

**LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TW I
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

TAHUN 2026



**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Realisasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Triwulan I (Per 31 Maret 2026) pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2026 Triwulan Triwulan I merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Renja yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target kinerja dan daya serap anggaran program/kegiatan berdasarkan realisasi DPA.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 5 Juni 2026

**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19720710 199201 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Metode Evaluasi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	6
BAB II TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9
BAB III PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN SUB KEGIATAN DPA DAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	10
A. Perbandingan Jumlah Program Renstra, Renja dan DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau...	13
B. Perbandingan Jumlah Kegiatan Renstra, Renja dan DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau...	13
C. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan Renstra, Renja dan DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau...	14
BAB IV CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA	16
A. Capaian Target Indikator Sasaran	16
B. Capaian Target Indikator Program.....	17
C. Capaian Target Indikator Sub Kegiatan.....	19
BAB V KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	27
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	28
B. Rekomendasi.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan	7
Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	9
Tabel 3.1 Perbandingan DPA, Renja dan Renstra Tahun 2026	10
Tabel 4.1 Pencapaian Target Indikator Sasaran Triwulan I	16
Tabel 4.2 Pencapaian Target Indikator Program Triwulan I.....	17
Tabel 4.3. Pencapaian Realisasi Anggaran Hingga Triwulan I.....	19
Tabel 4.4 Pencapaian Target Indikator Sub Kegiatan Triwulan I	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen Rencana Kerja yang disusun oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra). Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Rencana Kerja di Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah disusun. Hal ini untuk mengetahui sejauhmana kesesuaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan dokumen Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah disusun sebelumnya.

Evaluasi terhadap hasil Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dicapai, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi terhadap hasil Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Badan Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 733) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan

Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 894);

22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 897);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064).
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 Nomor 1083);

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Evaluasi terhadap hasil renja tahun 2026 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan serta mengetahui tingkat ketercapaiannya.

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2026 berdasarkan target-target indikator yang tercantum dalam Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.
3. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 dan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

D. Metode Evaluasi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Pada bagian ini memuat tentang metode evaluasi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, meliputi metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini adalah dengan menggunakan formulir evaluasi Renja yang akan diisi capaiannya oleh masing-masing bidang.

b. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja ini adalah dengan menghitung: (1) persentase capaian kinerja masing-masing indikator dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau; (2) persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 1	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 2	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 3	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 4	Status
1	22,5 % ≤ 100 %	45 % ≤ 100 %	68 % ≤ 100%	91% ≤ 100%	Sangat tinggi (ST)
2	20 % ≤ 22,5 %	39 % ≤ 44 %	58 % ≤ 67%	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3	17 % ≤ 19 %	33 % ≤ 38 %	50 % ≤ 57%	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4	13 % ≤ 16 %	26 % ≤ 32 %	39 % ≤ 49%	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 13 %	≤ 25 %	≤ 38%	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Tabel 1. Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

c. Teknik Analisis Data

Teknis analisis dilakukan dengan teknik perbandingan antara realisasi kinerja dan keuangan dengan target kinerja dan anggaran; dan analisis permasalahan yang hadapi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam pencapaian target Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bab ini berisi tentang uraian tujuan, sasaran dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dievaluasi. Penyajian tujuan, sasaran dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2025
1.	Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Persentase Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terealisasi	Persen	72,86%	Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota	50%
							Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan	42,55%
							Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring	34,48%

BAB III

PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN SUB KEGIATAN DPA DAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bab ini berisi tentang uraian perbandingan antara jumlah program, sub kegiatan dan anggaran DPA dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.1 Perbandingan DPA, Renja dan Renstra Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA	RENJA	RENSTRA
5.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	√	√	√
5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	√
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	√
5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	√	√	√
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	√	√	√
5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√	√
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	√	√	√
5.06.01.1.06	Administrasi Umum Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	√	√	√

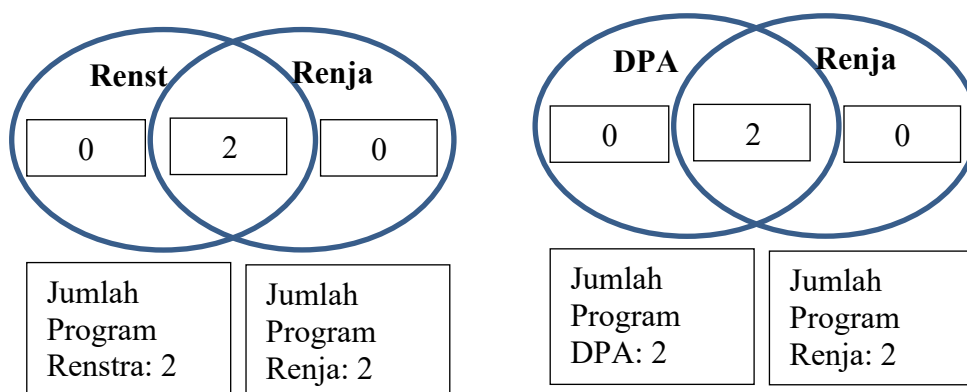
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA	RENJA	RENSTRA
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	√
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	√	√	√
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X	√	√
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	√	√	√
	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√
5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	X	√	√
	Pengadaan Mebel	X	√	√
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	X	√	√
5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	√
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	√
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	√
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	X	√	√
5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	√
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	√
5.06.02	Program Pengelolaan Perbatasan	√	√	√

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA	RENJA	RENSTRA
5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama	✓	✓	✓
	Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	✓	✓	✓
	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	✓	✓	✓
5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	✓	✓	✓
	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	✓	✓	✓
	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	✓	✓	✓
	Fasilitas Penegakan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah	✓	✓	✓
	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	✓	✓	✓
5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	✓	✓	✓
	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	✓	✓	✓
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	✓	✓	✓
	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓

A. Perbandingan Jumlah Program Renstra, Renja dan DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Perbandingan antara jumlah Program dalam DPA dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada tahun 2026 dapat dilihat pada *flowchart* 1 berikut;

Flowchart 1: Perbandingan jumlah Program DPA, Renja dan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2026



Uraian penjelasan;

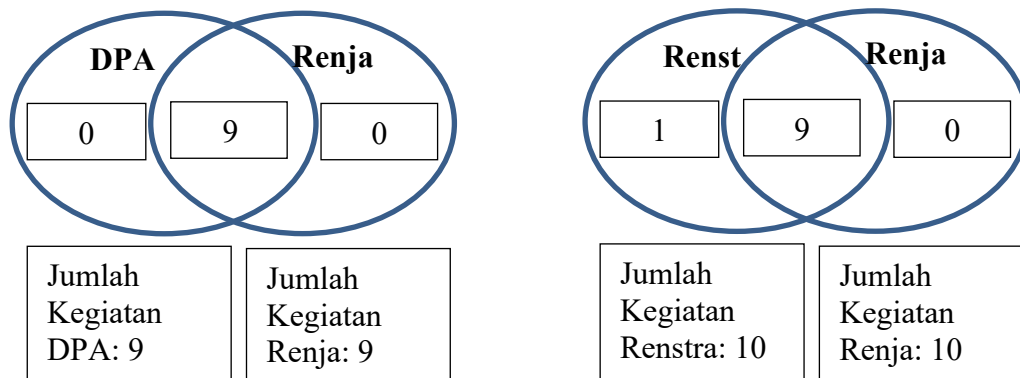
Jumlah Program yang dilaksanakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 sangat konsisten dimana jumlah program dalam Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sangat konsisten yaitu terdiri dari 2 (dua) Program yang sama baik nama program maupun jumlahnya. Merupakan implemementasi dari nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 beserta pemutakhirannya.

B. Perbandingan Jumlah Kegiatan Renstra, Renja dan DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Perbandingan antara jumlah Kegiatan dalam DPA dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 dapat dilihat pada *flowchart* 2 berikut;

Flowchart 2: Perbandingan jumlah Kegiatan DPA dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2026



Uraian penjelasan:

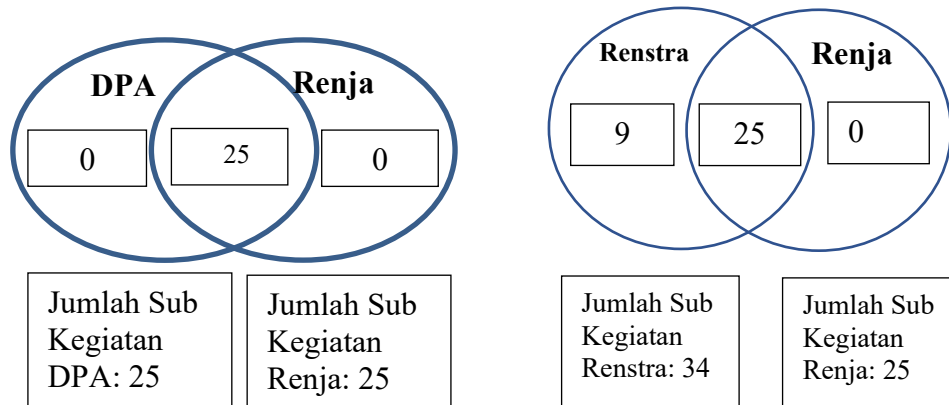
Dari *flowchart* di atas dapat digambarkan bahwa berdasarkan analisa dokumen dapat dijelaskan bahwa pada DPA tahun 2026 terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang seluruhnya ada dalam dokumen Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2026 yang total kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2026 terdapat 9 (sembilan) kegiatan.

Dokumen Rencana Kerja dan dokumen Rencana Strategis OPD Irisan kegiatan dalam Renstra terdapat 10 (sepuluh), dan didalam renja juga terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang perlu dilaksanakan yang tercantum dalam Renstra.

C. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan Renstra, Renja dan DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Perbandingan antara jumlah Sub Kegiatan dalam DPA dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada tahun 2026 dapat dilihat pada *flowchart* 3 berikut;

Flowchart 3: Perbandingan jumlah Sub Kegiatan DPA dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2026



Uraian penjelasan:

Dari *flowchart* di atas dapat digambarkan bahwa berdasarkan analisa dokumen dapat dijelaskan bahwa pada DPA tahun 2025 terdapat 25 (dua puluh lima) sub kegiatan tetapi dalam dokumen Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah terdapat 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dikarenakan ada sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan.

Dokumen Rencana Kerja dan dokumen Rencana Strategis OPD Irisan sub kegiatan dalam Renstra terdapat 34 (tiga puluh empat), dan didalam renja juga ada 25 (dua puluh lima) sub kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA

Bab ini berisi tentang data informasi dan uraian analisis capaian kinerja sasaran, program dan sub kegiatan renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

A. Capaian Target Indikator Sasaran

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator sasaran Renja yang dievaluasi.

Tabel 4.1
Pencapaian Target Indikator Sasaran Triwulan I
(Januari – Maret 2026)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)
	Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Persentase Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terealisasi	%	72,86	10,00	13,72	Sangat Rendah

Triwulan I Tahun 2026 (data masuk sampai bulan Maret 2026) realisasi Indikator kinerja Sasaran yang berkategori kinerja/ status **Sangat Rendah (SR)** dengan presentase 10%. Capaian persentase kinerja sebesar 13,72% masih proses pencapaian target program yang direncanakan. Dimana rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara yang berupa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan Se-Provinsi Kepulauan Riau belum dilaksanakan masih dalam proses administrasi kelengkapan

pelaksanaan pembangunan. Sehingga capaian realiasi hanya 10% lebih rendah dari target 72,86% yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa Indikator kinerja program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau belum mencapai target yang ditetapkan.

B. Capaian Target Indikator Program

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator Program Renja yang dievaluasi. Capaian kinerja Program Renja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Pencapaian Target Indikator Kinerja Program Hingga Triwulan I
(Januari – Maret 2026)

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Target 2026	Kategori Kinerja (Status)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Peredikat	B	-	-	SR
		Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	83	-	-	SR
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,5	-	-	SR
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota	%	50%	10%	20%	T

		Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan	%	42,55%	37%	86,95%	ST
		Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring	%	34,48%	6%	17,40%	S

Pada Triwulan I Tahun 2026 (data masuk sampai bulan maret 2026) Capain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator outcome terdiri dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat) dimana target yang ditetapkan B belum terealisasi, Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia belum terealisasi dari target 83 yang berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (SR)** dan Indeks Kepuasan Masyarakat belum terealisasi dari target yang ditetapkan sebesar 81,5% yang berkategori kinerja/ status **Sangat Rendah (SR)**.

Sementara untuk Program Pengelola Perbatasan dimana indikator outcome yang ditetapkan terdiri dari Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota dengan target sebesar 50% dan terealisasi sebesar 20% yang berkategori kinerja/ status **Tinggi (T)**, Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan ditetapkan target sebesar 42,55% diperoleh realiasi sebesar 37% yang berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)** dan selanjutnya Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring dengan target 34,48% terealisasi sebesar 6% yang berkategori kinerja/ status **Sedang (S)**. capaian kinerja yang diperoleh belum maksimal sehingga belum mencapai target sasaran yang ditetapkan.

Sementara informasi dan analisis capaian realisasi anggaran program Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dievaluasi dapat dilihat dari tabel 4.3 berikut;

Tabel 4.3. Pencapaian Realisasi Anggaran Hingga Triwulan I (Januari – Maret 2026)

No	Nama Progam	Realisasi Anggaran	Status
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22,34%	T
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	1,91%	SR

Pada Triwulan I Tahun 2026 (data masuk sampai bulan maret 2026) realisasi anggaran pada program yang berkategori kinerja/ status **Tinggi (T)** yaitu; pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan realisasi sebesar 22,34% atau Rp. 1.262.807.157,- dan Program Pengelola Perbatasan yang berkategori kinerja/ status **SR (Sangat Rendah)** dengan realisasi sebesar 1,91% atau Rp. 18.337.984,-

Semua Program yang telah direncanakan belum dapat terealisasi dengan baik dan masih proses mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

C. Capaian Target Indikator Sub Kegiatan

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator sub kegiatan dan anggaran Renja yang dievaluasi. Capaian kinerja indikator sub kegiatan dan anggaran Renja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut;

Tabel 4.4
Pencapaian Target Indikator Sub Kegiatan Triwulan I
(Januari – Maret 2026)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Ket
		DPA	Realisasi	Kinerja	Realis asi	Kinerja	Realisasi	
I	Program Pengelolaan Perbatasan	960.866.096	18.337.984	0	1,91	SR	SR	
1	Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	818.922.935	18.337.984	0	2,24	SR	SR	
1.1	Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	799.991.869	0	0	0	SR	ST	
1.2	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	18.931.066	18.337.984	0	96,87	SR	SR	
2	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	70.444.949	0	0	0	SR	SR	
2.1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	19.784.541	0	0	0	SR	SR	
2.2	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	16.880.478	0	0	0	SR	SR	
2.3	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	16.580.938	0	0	0	SR	SR	
2.4	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial	17.198.992	0	0	0	SR	SR	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Ket
		DPA	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	
	Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan							
3	Monitoring dan Evaluasi	71.498.212	0	0	0	SR	SR	
3.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	22.769.491	0	0	0	SR	SR	
3.2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	11.627.927	0	0	0	SR	SR	
3.3	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.100.794	0	0	0	SR	SR	
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.652.769.340	1.262.807.157	13,64	22,34	SR	T	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.259.471	6.878.000	12,5	6,73	SR	SR	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.264.972	0	0	0	SR	SR	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	29.994.499	6.878.000	25	22,93	ST	ST	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Ket
		DPA	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	
2	Administrasi Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	5.211.873.162	1.262.807.157	62,5	23,58	SR	ST	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.013.009.162	1.229.078.067	100	24,52	ST	ST	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	198.864.000	0	25	0	ST	SR	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.020.618	0	0	0	SR	SR	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.020.618	0	0	0	SR	SR	
4	Administrasi Umum Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	200.508.142	21.851.090	6,25	10,89	SR	SR	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.277.160	0	0	0	SR	SR	
4.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.551.204	0	0	0	SR	SR	
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.790.621	0	0	0	SR	SR	
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.360.500	0	0	0	SR	SR	
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			-	-	-	-	
4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.975.000	0	25	0	SR	SR	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Ket
		DPA	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	
4.6	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.723.648	21.851.090	25	19,05	ST	S	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	-	-	
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-		-	-	-	-	
5.2	Pengadaan Mebel	-		-	-	-	-	
5.3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-		0	0	SR	SR	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.417.956	0	0	0	SR	SR	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.213.836	0	25	0	ST	SR	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.389.648	0	25	0	ST	SR	
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.814.472	0	25	0	ST	SR	
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-		-	-	-	-	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.520.000	0	0	8,40	SR	SR	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	52.800.000	5.000.000	0	9,47	SR	SR	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Ket
		DPA	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.720.000	0	0	0	SR	SR	
	Total	6.613.635.436	1.281.145.141	P 20,73 K 9,68 SK 9,68	19,37	SR SR SR	SR	

Dari tabel pencapaian target anggaran dapat disimpulkan bahwa;

1. Realisasi anggaran Badan Pengelola Perbatasan Dearah Provinsi Kepulauan Riau TW I (Januari – Maret 2026) sebesar **Rp. 1.281.145.141,- atau 19,37%**.
2. Status pencapaian realisasi Kinerja hingga Triwulan I Tahun 2026 realisasi target indikator sub kegiatan yang berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)** yaitu ada 8 (Delapan) terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu: Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Dan terdapat Sub Kegiatan yang berkategori kinerja/status **Sangat Rendah (SR)** yaitu ada 17 (Tujuh Belas), terdapat 8 (Delapan) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu: Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan terdapat 9 (sembilan) Sub kegiatan pada Program Pengelola Perbatasan, yaitu: Sub Kegiatan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Fasilitasi Penegakan , Pemeliharaan, dan Pengamanan Wilayah Batas Negara Pembangunan Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan, dan Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Realisasi anggaran kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2026 (Januari – Maret 2026) terdiri dari realisasi target indikator sub kegiatan yang berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)** yaitu ada 2 (dua) terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu: Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Dan terdapat Sub Kegiatan yang berkategori status **Sedang (S)** yaitu ada 1 (satu), terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu: Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Dan terdapat Sub Kegiatan yang berkategori status **Sangat Rendah (SR)** yaitu ada 22 (dua puluh dua), terdapat 13 (tiga belas) sub kegiatan pada

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu: Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan terdapat 9 (sembilan) Sub kegiatan pada Program Pengelola Perbatasan, yaitu: Sub Kegiatan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Fasilitas Penegakan , Pemeliharaan, dan Pengamanan Wilayah Batas Negara Pembangunan Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan, dan Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V

KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Belum tersedianya data rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri RI
2. Belum sinkronnya program kegiatan pembangunan kawasan perbatasan dengan lintas instansi terkait
3. Sulitnya koordinasi di lintas sektoral dan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten/Kota
4. Terdapat efesiensi anggaran sehingga kegiatan tidak maksimal

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2026 telah berusaha menunjukkan kinerja yang maksimal melalui pelaksanaan serangkaian program-program yang dituangkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang diembannya untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Pada tahun 2026 ini Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 2 (dua) Program yang terbagi dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan.

Secara umum realisasi fisik dan keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang didanai dari APBD pada Triwulan I tahun 2026 belum mencapai target, di mana perbandingan realisasi kinerja dan keuangan hingga September 2026 dengan capaian realisasi kinerja capaian Program 20,73% (Sangat Rendah), Kegiatan 9,68% (Sangat Rendah, Sub Kegiatan 9,68 (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan mencapai **1.281.145.141,-** atau **19,37%** (Sangat Rendah) dari pagu APBD yang dikelola sebesar **6.613.635.436,-**.

Dari capaian realisasi tersebut, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Rekomendasi

Adapun beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

- 1) Perlunya koordinasi dan konsolidasi antara Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

- 2) Pimpinan agar melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan
- 3) Pemenuhan Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Demikianlah Laporan Evaluasi Hasil Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2026 ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta menjadi bahan evaluasi dan pengendalian pada triwulan berikutnya. Dengan dibuatnya laporan evaluasi hasil Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah ini diharapkan akan lebih memudahkan bagi pimpinan dan staf dalam mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan kedepannya.

Tanjungpinang, 5 Juni 2026

**Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**



Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19720710 199201 1 003

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KEPULAUAN RIAU Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2026																													
No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			
		5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN			57.455.239.973		6.129.768.952		6.613.635.436		1.281.145.141							1.281.145.141	9,68	19,37		1.281.145.141	4,12	2,23				
		5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			51.433.239.973		5.949.291.408		5.652.769.340		1.262.807.157							1.262.807.157	13,64	22,34		1.262.807.157	5,6	2,46	Badan Pengelola Perbatasan Daerah			
			Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di bidang perbatasan	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	420		83,16		83												0				0				
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	70		80		70								0		0										
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85		86,91		81.5								0		0										
		5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.080.000.000		143.350.379		102.259.471		6.878.000							6.878.000	12,5	6,73		6.878.000	2,5	0,64				
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Regulasi (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		0								0		0		0		0				
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		4		4		1						1		25		1		5						
		5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			715.000.000		94.837.700		72.264.972		-							-	0	0		-	0	0				
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		0							0		0		0		0					
		5.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			365.000.000		48.512.679		29.994.499		6.878.000							6.878.000	25	22,93		6.878.000	5	1,88				
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		4		4		1							1		25		1		5					
		5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			44.412.390.997		5.319.905.973		5.211.873.162		1.229.078.067							1.229.078.067	62,5	23,58		1.229.078.067	52,5	2,77				
			Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	27		14		27		27								27		100		27		100				
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		3						3		25		3		5						
		5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			43.217.841.124		5.139.971.973		5.013.009.162		1.229.078.067							1.229.078.067	100	24,52		1.229.078.067	100	2,84				
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	27		14		27		27							27		100		27		100					
		5.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.194.549.873		179.934.000		198.864.000		-							-	25	0		-	5	0				
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		3							3		25		3		5					
		5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			463.000.000		-		28.020.618		-							-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7		0		3		0								0		0		0		0				
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	24		0		8		0						0		0										
		5.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			360.000.000		-		28.020.618		-							-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7		0		3		0							0		0		0		0					

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
		5.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		103.000.000		-		-		-							-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	24	0		8		0							0		0		0		0		0			
		5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.591.500.000		194.018.991		200.678.133		21.851.090							21.851.090	6,25	10,89		21.851.090	1,25	0,84				
			Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	0		1		0							0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	0		2		0							0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	26	6		4		0							0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	24	3		3		0							0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	22	2		5		0							0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	12		12		0							0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	60	12		12		3							3		25		3		5		5			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	12		12		3							3		25		3		5		5			
		5.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		70.000.000		-		-		-							-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	0		1		0							0		0		0		0		0			
		5.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		365.000.000		-		7.277.160		-							-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	0		2		0							0		0		0		0		0			
		5.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		234.000.000		13.233.280		22.551.204		-							-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	26	6		4		0							0		0		0		0		0			
		5.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		233.000.000		25.793.736		32.790.621		-							-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	24	3		3		0							0		0		0		0		0			
		5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		128.000.000		10.244.587		15.360.500		-							-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	22	2		5		0							0		0		0		0		0			
		5.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		113.000.000		16.500.000		-		-							-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	12		12		0							0		0		0		0		0			
		5.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		107.000.000		8.255.000		7.975.000		-							-	25	0		-	5	0				
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	60	12		12		3							3		25		3		5		5			
		5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.341.500.000		119.992.388		114.723.648		21.851.090							21.851.090	25	19,05		21.851.090	5	1,63				
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	12		12		3							3		25		3		5		5			
		5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.796.000.000		-		-		-							-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0		0		0							0		0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket								
								I		II		III		IV															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0						0		0		0		0		0				
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3		0		1		0						0		0		0		0		0				
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	26		0		2		0						0		0		0		0		0				
		5.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			500.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0						0		0		0		0		0				
		5.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			520.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0						0		0		0		0		0				
		5.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			176.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3		0		1		0						0		0		0		0		0				
		5.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			600.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	26		0		2		0						0		0		0		0		0				
		5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			537.300.000		223.987.531		50.417.956		-						-	25	0		-	5	0		5	0		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Daerah yang dibutuhkan (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		3						3		25		3		5		5				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		3						3		25		3		5		5				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3						3		25		3		5		5				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3						3		25		3		5		5				
		5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			11.000.000		1.500.000		2.389.648		-						-	25	0		-	5	0		5	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		3						3		25		3		5		5				
		5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			9.300.000		-		1.213.836		-						-	25	0		-	5	0		5	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		3						3		25		3		5		5				
		5.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			222.000.000		42.000.000		46.814.472		-						-	25	0		-	5	0		5	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3						3		25		3		5		5				
		5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			295.000.000		180.487.531		-		-						-	25	0		-	5	0		5	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3						3		25		3		5		5				
		5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			553.048.976		68.028.534		59.520.000		5.000.000						5.000.000	0	8,4		5.000.000	0	0,9		5.000.000	0	1,11	
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		0		2		0						0		0		0		0		0				
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		1		0		0						0		0		0		0		0				
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22		1		5		0						0		0		0		0		0				
		5.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			452.048.976		-		52.800.000		5.000.000						5.000.000	0	9,47		5.000.000	0	1,11		5.000.000	0	1,11	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		0		2		0							0		0		0		0				
		5.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			60.000.000		66.794.300			-							-		0	0			-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		1		0		0							0		0		0		0				
		5.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			41.000.000		1.234.234			6.720.000			-				-		0	0			-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22		1		5		0							0		0		0		0				
		5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			6.022.000.000		180.477.544		960.866.096		18.337.984						18.337.984	0	1,91		18.337.984	0	0,3	Badan Pengelola Perbatasan Daerah			
			Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring (%)	202,07		29,73		34,48		6							6		17,4		6		2,97				
				Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan (%)	227,18		37,03		42,55		37				37		86,96	37		16,29								
				Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota (%)	297		45,24		50		10				10		20	10		3,37								
		5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama			2.482.000.000		41.110.664		818.922.935		18.337.984						18.337.984	0	2,24		18.337.984	0	0,74				
			Tersusunnya Dokumen Fasilitas Penyelesaian Kerjasama, Rencana Aksi Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	5		1		1		0							0		0		0		0				
				Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	5		1		1		0				0		0	0										
		5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah			1.830.000.000		23.264.140		799.991.869		-					-	0	0		-	0	0					
			Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	5		1		1		0						0		0		0		0					
		5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan			652.000.000		17.846.524		18.931.066		18.337.984						18.337.984	0	96,87		18.337.984	0	2,81				
			Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	5		1		1		0						0		0		0		0					
		5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			2.000.000.000		79.913.090		70.444.949		-					-	0	0		-	0	0					
			Tersusunnya Dokumen Kawasan Perbatasan yang Dikembangkan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan . (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan (Dokumen)	5		1		1		0							0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5		1		1		0				0		0											
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara (Dokumen)	5		1		1		0				0		0											
				Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5		1		1		0				0		0											
		5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan			500.000.000		19.477.177		19.784.541		-					-	0	0		-	0	0					

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab		Ket	
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%				
			Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5		1		1		0							0		0		0		0						
		5.06.02.1.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan			500.000.000		20.496.166		16.880.478			-							-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5		1		1		0							0		0		0		0						
		5.06.02.1.02.0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara			500.000.000		20.222.861		16.580.938			-							-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara (Dokumen)	5		1		1		0							0		0		0		0						
		5.06.02.1.02.0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan			500.000.000		19.716.886		17.198.992			-							-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5		1		1		0							0		0		0		0						
		5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi			1.540.000.000		59.453.790		71.498.212			-							-	0	0		-	0	0				
			Tersusunnya Dokumen Realisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan dalam pengembangan Kawasan Perbatasan (Dengan Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Laporan)	25		5		5		0																			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	25		5		5		0																			
		5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			512.000.000		16.299.860		22.769.491			-							-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5		1		1		0							0		0		0		0						
		5.06.02.1.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			498.000.000		12.573.350		11.627.927			-							-	0	0		-	0	0				
			Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Laporan)	25		5		5		0							0		0		0		0						
		5.06.02.1.03.0003	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			530.000.000		30.580.580		37.100.794			-							-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	25		5		5		0							0		0		0		0						
			JUMLAH			57.455.239.973		6.129.768.952		6.613.635.436			1.281.145.141						1.281.145.141					1.281.145.141						
			Rata-rata capaian kinerja (%)																		9,68	19,37			4,12	2,23		SUB KEGIATAN		
			Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			Rata-rata capaian kinerja (%)																		20,73				3,77			PROGRAM		
			Predikat kinerja																	Sangat Rendah				Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																														

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya	:

NAMA PERANGKAT DAERAH: BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/ Sasaran Renstra	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perubahan PD pada Tahun 2025-2029 (periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra sampai dengan Tahun 2025 (n+1)	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2026	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (n)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%) (n)	Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra PO sid Tahun 2025 (n)	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PO sid Tahun 2025 (n)	Unit Perangkat Daerah Penanganan g Jawab	Permasalahan yang Dihadapi									
										I		II									III		IV						
										11	12	13	14								15	16	17	18	19	20	21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
							K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K (%)	Ro (%)	K	Ro	K (%)	Ro (%)									
		Tujuan: Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Program Pengelolaan Perbatasan		Persentase Rencana Aksi Pembangunan Bata Wilayah Negeri dan Kawasan Perbatasan yang terealisasi		72,86	49.153.788.818	91,31	6.129.768.952	72,86	10.631.223.956	72,86	6.613.635.436	-	1.281.145.141	10	19,37	SR	SR	91								
		Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif																											
I	X	XX	01		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di bidang perbatasan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di bidang perbatasan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	40.583.428.936	BB	5.949.291.408	B	8.431.223.956	B	5.652.769.340	BB	5.949.691.640	BB	1.262.807.167	12	22,34	SR	T	#VALUE!	7.212.098.585	#VALUE!	6,16
					Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)		82,87		83,16		83		83		0			SR											
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		80		86,91		81,5		81,5		0			SR											
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terususnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Regulasi	Dokumen	10	767.660.833	100	143.350.379	2	215.000.000	2	102.259.471	0	6.878.000	13	6,73	SR	SR	100		160.228.379	10,00	0,20			
					Laporan		24				4		4					SR	SR										
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terususnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	530.977.350	2	94.837.700	2	150.000.000	2	72.364.972	0	-	0	0,00	SR	SR	2		94.837.700	0,20	0,18			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	236.073.498	4	48.512.679	4	65.000.000	4	29.994.499	1	6.878.000	25	22,93	ST	ST	5		55.390.679	0,25	0,23			
I	X	XX	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terususnya Laporan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Orang/bulan	135	40.817.866.154	100	6.319.905.973	27	6.931.223.956	27	5.211.873.162	0	1.228.078.667	25	23,58	ST	ST	100		6.648.984.640	0,74	0,16			
					Jumlah Orang yang Menemina Tugas ASN		Dokumen	60			12		12		0	0,00		SR	SR	0		-							
X	XX	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	135	30.345.610.408	27	5.139.971.973	27	6.708.818.082,86	27	5.013.009.162	27	1.228.078.067	25	24,52	ST	ST	54		6.369.050.040	0,40	0,16			
X	XX	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	1.171.955.746	12	179.934.000	12	222.405.873	12	198.864.000	3	-	25	0,00	ST	SR	15		179.934.000	0,25	0,15			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paket	4	278.000.000	-	3	200.000.000	3	28.020.618	0			SR	SR	0		-		0,00					
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	16										SR	SR										
					Pengadaan Pakatan Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakatan Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	205.000.000		3	150.000.000	3	28.020.618		0,00		SR	SR	0		-		-	-	-			
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkelakarnya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	73.000.000			50.000.000						SR	SR	0		-		-	-	-			
2	X	XX	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelakarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	5	1.586.753.142	100	194.018.991	1	586.500.000	200.678.133		21.851.090	10	10,89	SR	SR	100		216.678.981	20,00	0,12				
					Paket		8				2		2						SR	SR									
					Paket		28				4		4						SR	SR									
					Paket		23				3		3						SR	SR									
					Paket		28				6		6		0	0			SR	SR									
					Dokumen		60				12		12		0	0			SR	SR									
					Laporan		60				12		12		0	0			SR	SR									
					Laporan		60				12		12		0	0			SR	SR									
X	XX	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5	46.000.000	-	1	10.000.000							SR	SR	0		-		0,00				
X	XX	01	1.06	02	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Tersedianya Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Paket	8	140.000.000		2	65.000.000	2	7.277.160					SR	SR	0		-		0,00				
1	X	XX	01	1.06	03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	28	159.798.309	6	13.233.280	4	22.551.204	0	-	0	0	SR	SR	6		13.233.280	0,21	0,08				
2	X	XX	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	23	176.190.781	3	25.793.736	3	45.000.000	3	32.790.621	0	-	0	SR	SR	3		25.793.736	0,13	0,10			
3	X	XX	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	20	100.014.052	2	10.244.587	5	20.000.000	5	15.360.500	0	-	0	SR	SR	2		10.244.587	0,10	0,10			
4	X	XX	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	60	104.000.000	12	16.500.000	12	20.000.000	0	-	0		SR	SR	12		16.500.000	0,20	0,16				
5	X	XX	01	1.06	08	Facilitas Kunjungan Tamu	Terkelakarnya Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	60	79.260.000	12	8.255.000	12	30.000.000	12	7.975.000	3	-	25	0	ST	SR	15		8.255.000	0,25	0,10		
6	X	XX	01	1.06	09	Penyenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkelakarnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	1.051.500.000	12	119.992.388	12	381.500.000	12	114.723.648	3	21.851.090	25	19,05	ST	S	15		141.843.478	0,25	0,13		
3	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1	1.561.221.591			300.000.000						SR	SR									
					Unit		2												SR	SR									
					Paket		19												SR	SR									
					Unit		1	500.000.000											SR	SR	0		-		-	-			

[illegible]

No	Kode Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Tujuan/ Sasaran Renstra	Unitas/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kepolisian Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome/kegiatan) Indirect/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perubahan PD pada Tahun 2025-2029 (periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra sampai dengan Tahun 2025 (n-1)	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2026												Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2026 yang dievaluasi (%)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2026 yang dievaluasi (%) (n)		Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra PD sid Tahun 2026 (n)	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD sid Tahun 2026 (n)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Permasalahan yang dihadapi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									10						11						12						13						14								15				16		17		18		19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
									RENJA			DPPA 2026			K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro			K	Ro			K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro

[illegible]